

S
339.507
W16
e
2012

RecorHd : 22506
Reg : 22990



ELASTISITAS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh:

WIGA AYU DESMANITA

01081002006

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ELASTISITAS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Wiga Ayu Desmanita
NIM : 01081002006
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal : 4 Juli 2012

Tanggal : 5 Juli 2012

Dosen Pembimbing
Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota



Yunisvita, S.E., M.Si
NIP. 197006292008012009

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wiga Ayu Desmanita
NIM : 01081002006
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Elastisitas Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang.

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Yunisvita, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 24 Juli 2012

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, Juli 2012
Pembuat Pernyataan,



Wiga Ayu Desmanita
01081002006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi berjudul Elastisitas Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Elastisitas Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, Juli 2012

Penulis

ABSTRAK

ELASTISITAS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KOTA PALEMBANG

Oleh:
Wiga Ayu Desmanita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB dan DAU terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang. Variabel derajat desentralisasi fiskal dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari BPS dan Dispenda tahun 2001 – 2010.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Variabel PDRB dan DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki kepekaan elastis terhadap PDRB dan DAU.

Kata kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, PDRB, PDRBperkapita, DAU, PAD

ABSTRACT

ELASTICITY OF THE DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION OF PALEMBANG

By:

Wiga Ayu Desmanita

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Yunisvita, S.E., M.Si

The objective of this study was to analyze the influence of gross regional domestic product (PDRB) dan *General Allocation Fund* (DAU) to the degree of fiscal decentralization of Palembang. the degree of fiscal decentralization was seen from contribution of local own revenue (PAD) to the total of local revenue.

This study analyzed secondary data from Statistic Indonesia (BPS) and office of regional revenue (Dispenda) in 2001-2010. This study used the analysis of multiple linear regressions using *Ordinary Least Square* (OLS). The result showed that variable of PAD had positive and significant effect to the degree of fiscal decentralization. Variable of PDRB an DAU had positive and significant effect to the degree of fiscal decentralization. The degree of fiscal decentralization had elastic sensitivity to PDRB dan DAU.

Keywords: *degree of fiscal decentralization, PDRB, PDRBperkapita, DAU, PAD*



Diterjemahkan sesuai dengan aslinya,
Palembang, 1 Agustus 2012
Kepala Lab. Bahasa Program Pascasarjana Unsrat

Drs. Musih Hambali, MLIS
NIP. 19578261984031001

RIWAYAT HIDUP

- Nama Mahasiswa** : Wiga Ayu Desmanita
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 14 Oktober 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orangtua) : Kapt. A. Rivai Jl. Batu Nilam No. 1865 RT. 17
RW. 05, Bukit Kecil
Alamat Email : ryuga_azzura@yahoo.com
- Pendidikan Formal:**
Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 1 Palembang (1997-2002)
SMP : SMP Negeri 1 Palembang (2002-2005)
SMA : SMA Negeri 2 Palembang (2005-2008)
- Pendidikan Non Formal** : Les bahasa Jepang di Gloria (2008-2010)
: Les bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Universitas
Sriwijaya (2009-2010)
: Les Komputer di Bina Sarana Indonesia (BSI)
(2011)
- Pengalaman Organisasi** : IKPP (Ikatan Keluarga Purna PASSMANDA)
: LOC (Liaison Officer Community)
: IKALOVO (Ikatan LO dan VO)
- Penghargaan Prestasi** : Pengajar Bahasa Jepang SMP Negeri 1 Palembang
(2010-2011)
: Enumerator di Bank Indonesia Palembang dalam
Survei Pemantauan Harga di Palembang periode
Juli s.d September 2011
: Liaison Officer Cabor Takraw untuk SEAGAMES
26th di Palembang (2011)
: Liaison Officer Jappnese Team untuk ISTAF
Super Series (ISS)Takraw di Palembang (2012)



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Peneltian	11
1.5.Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori	
2.1.1. Teori Desentralisasi Fiskal	13
2.1.2. Derajat Desentralisasi Fiskal	14
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.4. Dana Alokasi Umum (DAU)	19
2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.1.6. Konsep Elastisitas	21
2.2.Penelitian Terdahulu	22
2.3.Kerangka Pemikiran	24
2.4.Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Ruang Lingkup Penelitian	27
3.2.Sumber Data	27
3.3.Definisi Operasional Variabel	27
3.4.Metode Analisis	28

3.4.1. Analisis Deskriptif	29
3.4.1.1. Derajat Desentralisasi Fiskal	29
3.4.2. Analisis Statistik	30
3.4.2.1. Uji Root Test	30
3.4.2.2. Model Regresi	30
3.4.2.3. Uji Asumsi Klasik	32
3.4.2.4. Uji Hipotesis	33
3.4.2.4.1. Uji t	33
3.4.2.4.2. Uji F	34
3.4.2.4.3. Koefisien Determinasi	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
4.1.2. Perkembangan Total Pendapatan Daerah (TPD)	38
4.1.3. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	40
4.1.4. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)	41
4.1.5. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	42
4.1.6. Perkembangan PDRB perkapita	44
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Uji Root Test	45
4.2.2. Uji Integrasi	47
4.2.3. Estimasi dan Hasil Regresi Model	48
4.2.3.1. Model I	48
4.2.3.2. Model II	49
4.2.3.3. Model III	50
4.2.4. Uji Asumsi Klasik	52
4.2.4.1. Uji Normalitas	52
4.2.4.2. Uji Autokorelasi	54
4.2.4.3. Uji heterokedastisitas	55
4.2.5. Uji Hipotesis	57
4.2.5.1. Uji t	59
4.2.5.2. Uji F	60
4.2.5.3. Koefisien Determinasi	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
5.3. Keterbatasan Penelitian	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran-lampiran	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Transfer ke Daerah 2005-2010	7
Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang	9
Tabel 2.1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	14
Tabel 4.1. Perkembangan Komponen PAD Kota Palembang	37
Tabel 4.2. Pertumbuhan TPD Kota Palembang	39
Tabel 4.3. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Palembang.....	40
Tabel 4.4. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan	43
Tabel 4.5. Hasil Uji Akar Unit (Level)	46
Tabel 4.6. Hasil Uji Akar Unit (First Difference)	47
Tabel 4.7 Uji Durbin Watson Model I	54
Tabel 4.8 Uji Durbin Watson Model II	54
Tabel 4.9 Uji Durbin Watson Model III	55
Tabel 4.10 Hasil Uji t-Statistik Model I	57
Tabel 4.11 Hasil Uji t-Statistik Model II	58
Tabel 4.12 Hasil Uji t-Statistik Model III	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi	6
Gambar 1.2. Transfer ke Daerah 2005-2010.....	7
Gambar 1.3. Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang ..	8
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3.1. Uji signifikan t	34
Gambar 3.2. Uji signifikan F	35
Gambar 4.1. Perkembangan PAD Kota Palembang	37
Gambar 4.2. Perkembangan Total Pendapatan	39
Gambar 4.3. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Palembang ..	41
Gambar 4.4. Perkembangan PDRB Atas Harga Dasar Konstan Kota Palembang	42
Gambar 4.5. Perkembangan PDRBperkapita Atas Dasar Harga Konstan	44
Gambar 4.6. Uji Normalitas Model I	52
Gambar 4.7. Uji Normalitas Model II	53
Gambar 4.8. Uji Normalitas Model III	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Root Test (Level)	68
Lampiran 2 Hasil Uji Root Test (First Difference)	70
Lampiran 3 Hasil Regresi	72
Lampiran 4 Uji Heterokedastisitas	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Krisis ekonomi sebagai imbas dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang menimpa Indonesia membuat bangsa Indonesia berbenah diri dan melakukan reformasi total pada sistem pemerintahan. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah menyangkut diberlakukannya otonomi daerah di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Reformasi yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah yang didasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004.

Adanya kedua Undang-Undang ini membuka peluang daerah untuk meningkatkan kemandirian melalui pengembangan potensi lokal dan kinerja keuangan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya mengatur tentang pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengatur mengenai pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function*

atau uang mengikuti kewenangan. Menurut Ladjin (2008: 36), hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Kedua Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menjadi dasar desentralisasi fiskal di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih meluas. Sementara Undang-Undang No. 33 tahun 2004 akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Alasan yang mendorong diberlakukannya desentralisasi fiskal karena adanya ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang berlaku selama pemerintahan orde baru, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya SDA tidak dapat menikmati secara layak. Pinjaman dan bantuan luar negeri, penanaman modal asing (PMA) dan tata niaga di dalam negeri juga diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia bukanlah sebuah konsep baru. Konsep mengenai desentralisasi sudah disinggung sejak tahun 1975,

namun pelaksanaannya masih dibatasi sehingga ketimpangan di daerah masih terus berkembang. Menurut Zulyanto (2010: 4), pada masa orde baru pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dilakukan pemerintah dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat dan daerah lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi dari pada kutub desentralisasi.

Era baru desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya (Yudithia, 2008: 32). Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Penetapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan layanan publik ini ditujukan untuk dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

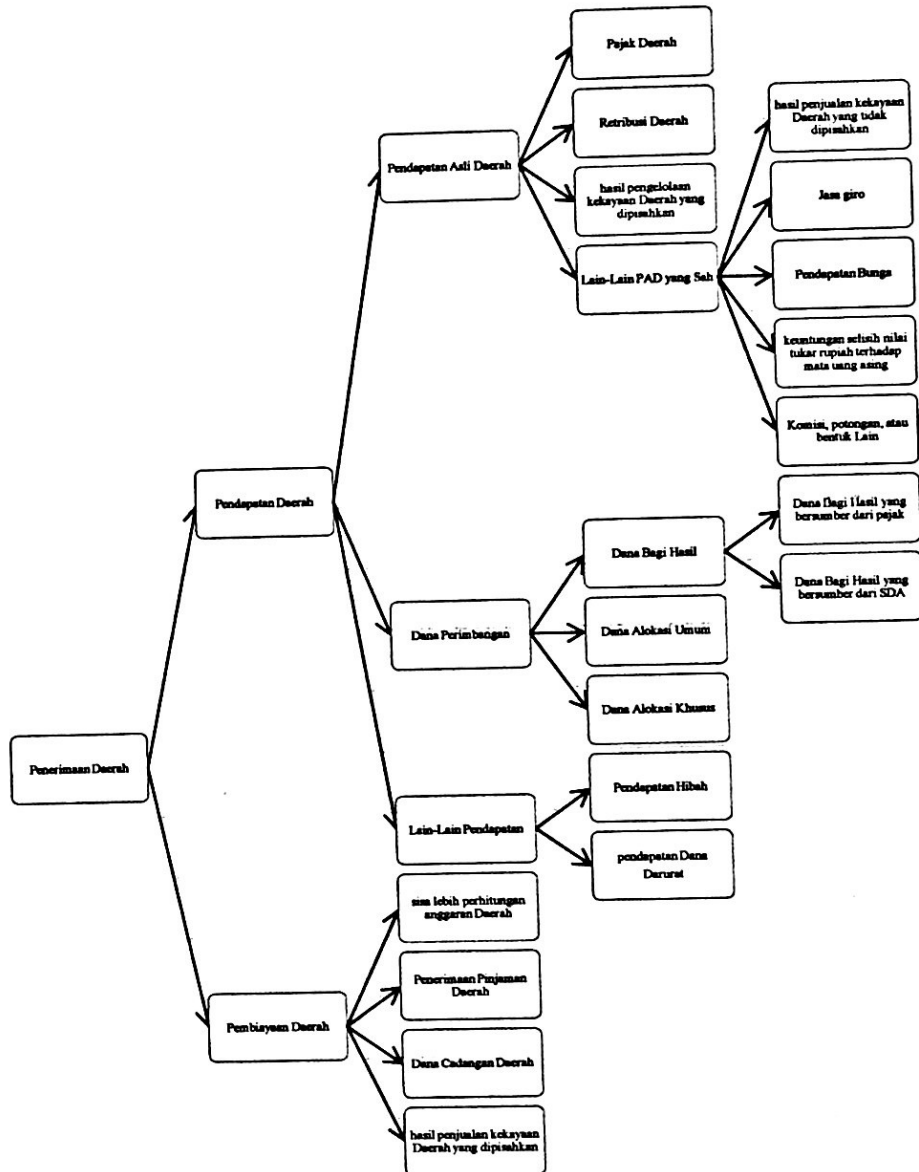
Seiring dengan diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini memang menjadi konsekuensi logis desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yakni pemerintah daerah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan. Penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam usaha

peningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel.

Pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa sebagian besar total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa sumber-sumber PAD di Kabupaten/Kota ternyata belum dapat menyokong terselenggaranya pembangunan daerah, karena sumber dana dari pemerintah pusat masih tetap lebih besar dari potensi yang dapat digali dari sektor PAD. Padahal adanya kesepadanan antara dana dari pusat dan PAD merupakan kriteria penting dari adanya otonomi daerah. Porsi PAD seharusnya jauh lebih besar daripada dana yang diterima dari pusat.

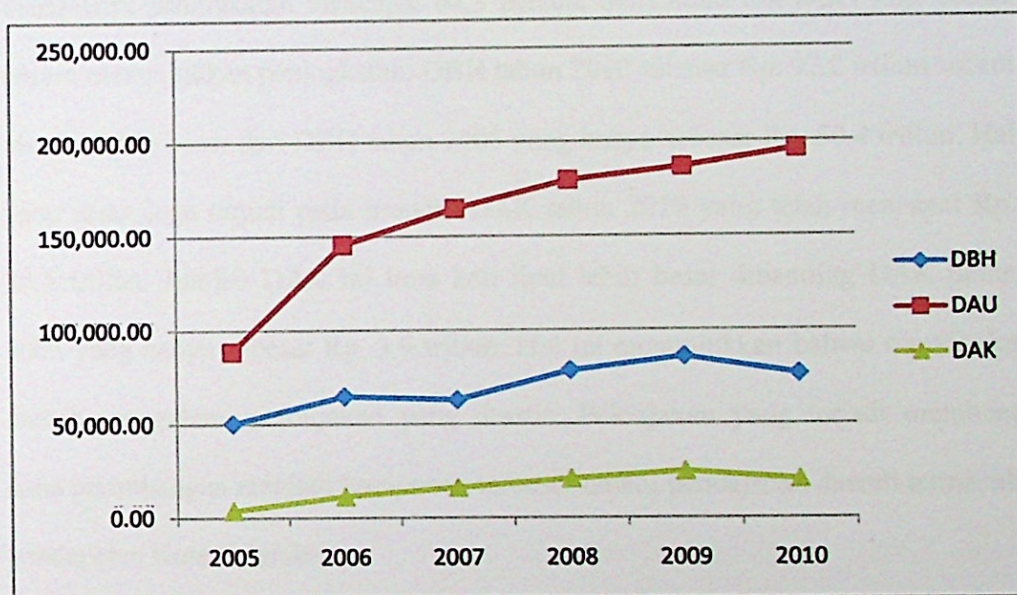
Salah satu indikator yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara (Halim, 2004: 35). Realitas yang terjadi selama ini adalah rendahnya proporsi PAD terhadap APBD, sehingga daerah sangat bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat. Terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat

diketahui bahwa derajat sentralisasi fiskal di Indonesia sangat tinggi di bandingkan dengan negara lain (Fanani, 2011: 5).



Gambar 1.1 Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi
 Sumber : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan satu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi didanai APBD sedangkan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai APBN.



Gambar 1.2 Transfer ke Daerah 2005-2010

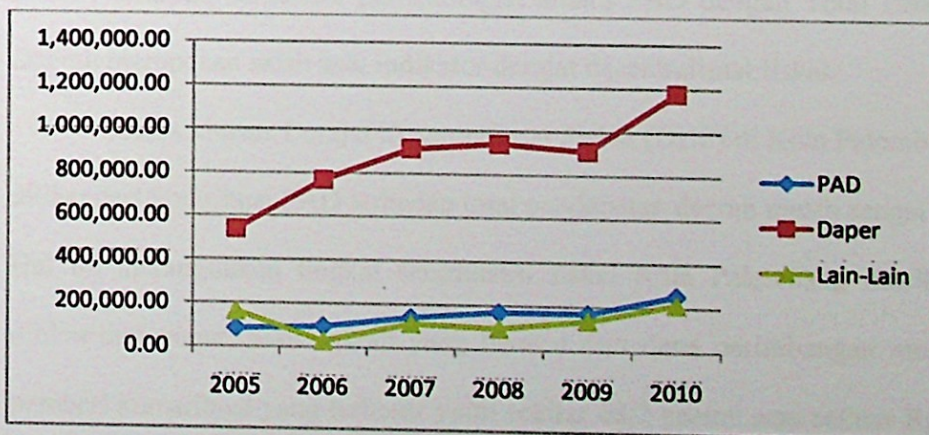
Sumber: Data Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 Transfer ke Daerah 2005-2010
(dalam milyar Rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dana	143.221,3	222.130,6	243.967,1	278.714,7	296.952,4	316.711,2
Perimbangan						
Dana Bagi Hasil	50.470,2	64.900,3	62.941,9	78.420,2	85.718,7	92.183,5
Dana Alokasi Umum	88.765,4	145.664,2	164.787,4	179.507,1	186.414,1	203.571,5
Dana Alokasi Khusus	3.976,7	11.566,1	16.237,8	20.787,3	24.819,6	20.956,3

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar dana perimbangan yang ditransferkan kepada pemerintah daerah adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Porsi DAU pada tahun 2005 sebesar 62,0 persen dari total dana perimbangan pada tahun yang sama. Sedangkan porsi DAU pada tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 64,3 persen. Sementara itu, DBH juga secara umum menunjukkan peningkatan. DBH tahun 2010 sebesar Rp. 92,2 triliun secara absolut lebih besar dari DBH tahun 2005 yang hanya sebesar Rp. 50,4 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada transfer DAK tahun 2010 yang telah mencapai Rp. 20,5 triliun. Jumlah DAK ini lima kali lipat lebih besar dibanding DAK tahun 2005 yang hanya sebesar Rp. 3,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa transfer ke daerah mengalami pelonjakan yang drastis. Pelonjakan yang terjadi membuat dana perimbangan menjadi komponen terbesar dalam pendapatan daerah termasuk pendapatan Kota Palembang.



Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang
 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang 2005-2010
(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Asli Daerah	86.100,10	97.202,80	142.128,30	171.383,50	170.540,60	255.193,60
Dana Perimbangan	538.994,00	767.271,10	913.469,10	939.914,60	910.374,80	1.177.289,90
Lain-lain pendapatan yang sah	165.263	29.513,80	113.123,80	98.207,70	138.256,20	215.842,30
Total	790.357,10	893.987,70	1.168.721,20	1.209.505,80	1.219.171,60	1.648.325,80

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.2, penerimaan APBD kota Palembang tahun 2005, penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sekitar 10,9 persen atau sekitar Rp. 86,1 milyar. Tahun 2010 penerimaan yang berasal dari PAD menyumbang sekitar 15,5 persen atau sekitar Rp. 255,2 milyar. Rendahnya porsi PAD Kota Palembang dianggap sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri terhadap pembiayaan daerahnya. Menurut Wulandari (2001: 20), kemandirian keuangan daerah seyogyanya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Meskipun demikian, perbandingan antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah merupakan salah satu indikator derajat desentralisasi fiskal.

Secara khusus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kota Palembang bila dilihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan tingkat sentralisasi fiskal Kota Palembang masih tinggi dilihat dari penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan merupakan pemberi kontribusi yang terbesar yaitu sekitar 68,2 persen atau sekitar Rp. 538,9 milyar pada tahun 2005. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010, penerimaan

daerah yang berasal dari dana perimbangan meningkat hingga 50 persen dari tahun 2005 sebesar 1,2 triliun. Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya meningkatkan penerimaan PAD dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahannya adalah bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Palembang, yang tercermin dari kontribusi PAD terhadap total APBD masih rendah. Kenyataan ini menyebabkan pendanaan bagi kepentingan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari dana yang berasal dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi, utamanya faktor non PAD yaitu pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) serta sumbangan dan bantuan yang bersifat umum (*Block Grants*) atau Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Elastisitas Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PDRB dan DAU terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB dan DAU terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori yang digunakan seperti teori Derajat Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, PDRB, DAU, dan elastisitas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dipakai sebagai kajian bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Derajat Derajat Desentralisasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan, saran – saran, dan keterbatasan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird dan Vaillancourt. 2011. Landasan Teori: Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Diambil pada tanggal 12 Maret 2012 dari <http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-derajat-otonomi-fiskal.html>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Data Pokok APBN 2005-2010*.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 2011. *Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2010*
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2011. *Palembang Dalam Angka 2010*. Palembang: BPS
- Fanani, Ahmad. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik 1988-2008. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi ketiga Jilid I & 11*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Haryanto, Joko Tri & Ester Sri Astuti. 2009. Desentralisasi dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* vol. 13 No. 1, 2009
- Hidayat, Paidi et al. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 3, Desember 2007 Hal. 213-222
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. UNHAS Makassar, 26-28 Juli 2007
- Ladjin, Nurjanna. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Landiyanto, Erlangga Agustini. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures working paper* No. 05/01, Januari 2005

- McEachern. 2009. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) Definisi, Tipe dan Pendekatannya. Diambil pada tanggal 12 Maret 2012 dari <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/produk-domestik-bruto-pdbgross-domestic.html>
- Purnomo. 2009. Analisis Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada pemerintah Kota Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta Tahun 2001-2006. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Radianto, Elia. 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku. *Prisma*, Vol.IX No. 3, hal 24-37
- Santosa, Purbayu Budi & Rahayu, Puji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan* Volume 2 No. 1, Juli 2005
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No. 1, Juni 2009 hal. 103-124
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana lokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Selatan.
- Sudarman, Ari. 2000. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. Analisis Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi kasus Daerah Tingkat II Banjarnegara). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. No. 1 Vol.2
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Susetyo, Didik. 2008. Analisis Dana Alokasi Umum dan Upaya Fiskal Kota Palembang. *Forum Dosen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 8 No. 2, November 2008

- Susetyo, Didik. 2008. Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 6, No. 1, hal 39-53
- Taryono. 2011. Analisis Kemandirian Fiskal dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Tahun I, No. 2, Maret 2011
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah JKAP* Volume 5, Nomor 2, November 2001
- Yudhitia. 2008. Alternatif Pendekatan dan Strategi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Karimun. *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Yuliati. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Malang. *Prisma*, LP3ES, No. 3, Volume 26
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Bengkulu. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)